



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2018 - 2019.
Masa Persidangan ke	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kemendikbud RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 19 September 2018.
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh., S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penyerahan Hasil Panja SN Dikdasmen; 2. Pembahasan RKA K/L TA 2019; 3. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK; dan 4. Lain-lain.
Hadir	: 28 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Bp.Muhadjir Efendi/Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.55WIB oleh **DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. PENYERAHAN HASIL PANJA SN DIKDASMEN.

Komisi X DPR RI telah menyerahkan hasil Panitia Kerja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Kemendikbud RI, diharapkan rekomendasi dari Panja tersebut dapat menjadi acuan dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan nasional di Indonesia khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

B. RKA K/L TA 2019.

1. Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor S-536/MK.02/2018 dan B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Pagu Anggaran Kementerian Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengajukan usulan pagu anggaran pada RAPBN TA 2019 sebesar **Rp35.983.000.000.000,-** (*tiga puluh lima triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar rupiah*).
2. Terhadap pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam butir B.1, pagu anggaran Kemendikbud RI Tahun 2019 menyampaikan, sebagai berikut:
 - a. Pagu anggaran mengalami penurunan sebesar **Rp.4,1 triliun** dari alokasi anggaran tahun 2018.
 - b. Penurunan anggaran bersumber dari anggaran pembangunan prasarana sekolah (sebagian diserahkan kepada Kementerian PUPR RI) sebesar **Rp.3,55 triliun** dan efisiensi anggaran untuk belanja barang lainnya sebesar **Rp.542,9 miliar**.
 - c. Pembangunan prasarana yang masih dianggarkan di Dikdasmen sebesar **Rp.1,3 triliun** untuk pembangunan unit sekolah baru dan renovasi/revitalisasi sekolah.
3. Terkait pagu anggaran yang dialihkan dari Kemendikbud RI ke Kementerian PUPR RI sebesar **Rp.3,8 triliun** untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, Kemendikbud RI dan Kementerian PUPR RI telah melakukan pembahasan dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Membuat payung hukum agar Kementerian PUPR RI dapat melaksanakan penugasan baru termasuk pembangunan prasarana pendidikan.
 - b. Membuat mekanisme kerja sama antara Kemendikbud RI dan Kementerian PUPR RI

C. Program yang akan didanai oleh DAK

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyampaikan arah kebijakan DAK fisik bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019, sbb:
 - a. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, untuk menghindari duplikasi pendanaan untuk kegiatan yang sama dan tumpang tindih antar jenis pendanaan;
 - b. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi perencanaan DAK Fisik kedalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran);
 - c. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (*Proposal Based*);
 - d. Mempertajam Menu Kegiatan DAK Fisik untuk dukungan penuntasan janji Presiden dan Wakil Presiden;

- e. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (*programmatic approach*) seperti pembangunan fasilitas sanitasi sekolah untuk mendukung Gerakan Hidup Sehat.
2. Kebijakan DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 bertujuan:
 - a. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum bidang Pendidikan.
 - b. Mendukung percepatan pencapaian Prioritas Nasional yang menjadi kewenangan daerah.
 - c. Perhitungan pendanaan DAK Fisik yang akurat dan akuntabel.
 - d. Efisiensi sumber Pendanaan Daerah.
3. Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019, sebesar **Rp.17.674.275.540.430,-** (*tujuh belas triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

Jenis DAK	Jumlah
Reguler	Rp. 14.786.124.250.756,-
Afirmasi	Rp. 585.058.783.674,-
Penugasan	Rp. 2.303.092.506.000,-
Total	Rp. 17.674.275.540.430,-

4. Arah Kebijakan DAK Non-Fisik bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
 - a. Perbaiki kualitas kinerja untuk seluruh bidang DAK Non-Fisik.
 - b. Mendorong penggunaan dukungan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan publik di daerah.
 - c. Penguatan kebijakan afirmasi dalam mengalokasikan DAK Non-Fisik untuk daerah 3T.
 5. Anggaran DAK Non-Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 117.468.500.000.000,-** (*seratus tujuh belas triliun empat ratus enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah*).
- D. Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019, Kemendikbud RI menyampaikan usulan kenaikan harga satuan Program Indonesia Pintar Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.3.919.894.875.000,-** (*tiga triliun sembilan ratus sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

E. SIKAP DAN PANDANGAN KOMISI X DPR RI

1. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI, dan menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara tertulis kepada Komisi X DPR RI minimal enam bulan ke depan.
2. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran (Sementara) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada RAPBN TA 2019, sebesar

Rp35.983.000.000.000,- (*tiga puluh lima triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar rupiah*), yang dialokasikan untuk:

(dalam Miliar Rupiah)

Program	Pagu Anggaran RAPBN 2019
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.798,2
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	188,5
Pendidikan Dasar dan Menengah	18.241,9
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.813,3
Penelitian dan Pengembangan	1.188,5
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	581,6
Pelestarian Budaya	1.792,3
Guru dan Tenaga Kependidikan	10.378,5
TOTAL	35.983,0

3. Terhadap pagu Anggaran (Sementara) Kemendikbud RI pada RAPBN TA 2019, Komisi X DPR RI meminta kepada Kemendikbud RI, untuk:
 - a. memastikan alokasi anggaran yang ada di Kementerian PUPR RI untuk pembangunan infrastruktur pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Renstra Kemendikbud RI.
 - b. memastikan penurunan alokasi anggaran pada Kemendikbud RI tidak mengganggu program prioritas nasional dan *output* program prioritas Kemendikbud RI.
 - c. memberikan penjelasan terhadap usulan baru yang dianggarkan dalam DAK Non-Fisik Tahun Anggaran 2019 yaitu: (i) BOP Kesetaraan, dan (ii) BOP Museum dan Taman Budaya.
 - d. mendukung usulan kenaikan harga satuan Program Indonesia Pintar dengan kebutuhan tambahan anggaran dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.3.919.894.875.000,-** (*tiga triliun sembilan ratus sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No.	Jenjang	Sasaran	Harga Satuan Awal	Usulan Perubahan	
				Harga Satuan Usulan	Usulan Tambahan Anggaran*)
1.	SD	10.360.614	450	750	2.340.153.500
2.	SMP	4.369.968	750	1.000	903.702.500
3.	SMA	1.367.559	1.000	1.250	293.747.125.
4.	SMK	1.829.167	1.000	1.250	382.291.750
	Total	17.927.308			3.919.894.875

*) Total kebutuhan anggaran untuk PIP awal adalah sebesar **Rp.9.712.336.653.000,-** (*sembilan triliun tujuh ratus dua belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) menjadi **Rp.13.632.231.528.000,-** (*tiga belas triliun enam ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

- e. mengawal implementasi Inpres No.9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia untuk penguatan pendidikan vokasi.
4. Terhadap alokasi program yang akan didanai oleh DAK Fisik Pendidikan pada RAPBN Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.17.674.275.540.430,-** (*tujuh belas triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) dan DAK Non-Fisik sebesar **Rp. 117.468.500.000.000,-** (*seratus tujuh belas triliun empat ratus enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah*), Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI, agar memperhatikan kebijakan Kemendikbud RI serta aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.
5. Komisi X DPR RI menugaskan kepada anggota Komisi X DPR RI yang menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI untuk menyampaikan hasil rapat kerja hari ini, dan memperjuangkan kemungkinan terjadinya penambahan anggaran.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **17.20** WIB

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI

MUHADJIR EFENDI

KETUA RAPAT,

DR.IR. DJOKO UDJIANTO,M.M.